

KEBIJAKAN SAME SEX MARRIAGE DI SWEDIA

Mareta Dwi Widya N¹
Nim. 1002045205

Abstract

Swedish government policy granted to LGBT people makes LGBT law enforcement and free from discrimination. One of the policies given by the government is to legalize the same sex marriage, this policy can be understood through the concept of human rights, in the LGBT have equality with the heterosexual. The Swedish government also grants rights that have been set in the law, including the right to the discrimination, civil rights, residence rights, to the right of adoption of children. Support gained by the LGBT, made the Swedish government legalize the same sex marriage. The reason the Swedish government made the policy, so that LGBT get its rights, have equality with heterosexual, protect LGBT from discrimination, and make Sweden become the first country that hold same-sex marriage in majority of big church in Sweden.

Keywords: *Sweden, Same Sex Marriage, LGBT*

Pendahuluan

LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, and Transgender*) merupakan suatu komunitas yang dibentuk berdasarkan persamaan nasib dan kepentingan tiap individu di dalamnya. LGBT terdiri atas kelompok *lesbian* yang ditujukan kepada para wanita yang memiliki hubungan romansa dengan sesama wanita. Sedangkan yang ditujukan kepada laki-laki yang memiliki interaksi intim dengan sesama lelaki biasa disebut *gay*. Selain itu, di dalam kelompok LGBT juga terdapat kaum *Biseksual* yaitu lelaki maupun perempuan yang memiliki interaksi intim atau hubungan romansa baik dengan perempuan atau lelaki yang bisa membuatnya nyaman. Sedangkan *transgender* adalah sebutan bagi peran yang melakukan perubahan peran sosialnya. (Deana F. Morrow, *Sexual Orientation and Gender Expression in social Work Practice*, Columbia University Press New York, Page 7)

Keberadaan kaum ini berkembang cukup pesat di Eropa pada tahun 1932. Fenomena ini juga berpengaruh di Swedia, sebuah negara di Semenanjung Balkan. Aktivitas seksual sesama jenis di Swedia dilegalkan pada tahun 1944 beberapa tahun sebelum PBB mendeklarasikan piagam yang berisi tentang hak asasi manusia secara universal dan mendirikan *Riksförbundet för homosexuella, bisexuella* (RFSL) di tahun 1950. RFSL adalah sebuah organisasi non-profit yang bekerja untuk hak-hak lesbian, gay, biseksual dan transgender. Tujuannya adalah bahwa hak yang sama, peluang dan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

kewajiban akan berlaku untuk orang lain dalam masyarakat. Aktivitas organisasi seksual sesama jenis ini dilegalkan pada tahun 1950 oleh Pemerintah Swedia. (“*LGBT Rights in Sweden*”, mengutip dari www.Research.omicsgroup.org/index.php/LGBT_rights_in_Sweden diakses pada tanggal 12 Januari 2015). Di antara negara-negara Eropa, Swedia merupakan negara pertama yang melegalkan keberadaan LGBT di negaranya. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya peraturan tentang pengesahan keberadaan homoseksual, tahun 1975 tentang hukum perubahan gender, tahun 1987 tentang Swedia memberi status hukum kepada pasangan sesama jenis sama seperti status hukum kaum *heteroseksual* dan melarang berbagai bentuk diskriminasi terhadap pasangan sesama jenis sehingga Swedia menjadi negara yang paling ramah terhadap kaum *homoseksual*, tahun 1995 Parlemen Swedia mengesahkan *Register Partnership Act di tahun 1995* tentang pelegalan hubungan sesama jenis melalui otoritas hukum negara. (Jens M. Scherpe, *the legal recognition of same-sex couples in Europe and the role of European Court of Human Rights* hal 83-84 pdf)

Inti dari kebijakan *same sex marriage* adalah pengesahan pernikahan secara huku atau sosial antara dua orang jenis kelamin biologis yang sama atau jenis kelamin sosial yang sama. Pengakuan hukum pernikahan sesama jenis atau kemungkinan untuk melakukan pernikahan sesama jenis kadang-kadang disebut sebagai kesetaraan perkawinan atau perkawinan yang sama. Pasangan yang melakukan pernikahan sesama jenis ini, biasa disebut Homoseksual, yaitu hubungan yang dilakukan Antara dua pasangan yang sejenis. (<http://www.sweden.se/eng/Home/Lifestyle/Reading/Sweden-says-I-do-to-same-sex-marriage>). Dikeluarkannya kebijakan *same sex marriage* ini di Swedia menuai pro dan kontra baik di parlemen maupun di masyarakatnya. Di parlemen, pro dan kontra terlihat pada saat sebelum disahkannya kebijakan ini, proses pengajuan proposal kebijakan muncul di parlemen pada Oktober 2007. Ide ini diajukan oleh enam partai politik yaitu Partai Kiri, Partai Hijau, Partai Demokrat Sosial, Partai Rakyat Liberal, dan Partai Moderat. Satu yang Partai yang menolak usul ini adalah Partai Demokrat Kristen. Akhirnya ide inilah yang digulirkan dalam referendum Januari 2009.² Sedangkan di masyarakat, pro dan kontra terlihat dari hasil referendum yang digelar oleh pemerintah pada Januari 2009.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Konsep HAM (Hak Asasi Manusia)

Hak Asasi Manusia menurut Miriam Budiarjo merupakan suatu hak dasar yang dimiliki oleh tiap manusia semenjak ia lahir dan tidak dapat diganggu gugat keberadaannya. Dalam konsep HAM, tiap individu memiliki derajat dan martabat yang sama. Konsep HAM ini didasari oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin oleh Elenor Roosevelt dan secara resmi disebut “Universal Declaration of Human Rights”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh

²<http://www.sweden.se/eng/Home/Lifestyle/Reading/Sweden-says-I-do-to-same-sex-marriage>

negara hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Ciri pokok dari hakikat hak asasi manusia berdasarkan konsep HAM adalah:

1. Hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. Hak asasi manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis
2. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal usul, ras, agama, etnik, dan pandangan politik.
3. Hak asasi manusia tidak boleh dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap memiliki hak asasi manusia meskipun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi bahkan melanggar hak asasi manusia. (Humaniora, Seri, *Jalan Kemanusiaan panduan untuk memperkuat hak asasi manusia*, Laperia Pustaka Utama, Yogyakarta, 1999)

Konsep Sistem Politik

Sistem politik adalah sistem interaksi yang terdapat dalam semuamasyarakat yang bebas/merdeka dengan melaksanakan fungsi-fungsi integrasi dan adaptasi. Pengertian sistem politik menurut Gabriel A. Almond menyatakan bahwa sistem politik adalah merupakan sistem interaksi yang terjadi didalam masyarakat yang merdeka. Sistem politik itu menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Fungsi integrasi yang dijalankan oleh sistem politik adalah untuk mencapai persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang bersangkutan. Adaptasi adalah merupakan fungsi penyesuaian terhadap lingkungan. (Haryanto. *Sistem Politik: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty 1982, Hal.3)

Dalam menganalisa sistem politik, Gabriel Almond menggunakan tiga konsep dasar yang telah dianggapnya dapat menjelaskan fenomena politik dalam suatu negara yang mempunyai hubungan interaksi dengan masyarakat yang melingkupinya, baik masyarakat politik domestik maupun internasional. Adapun tiga konsep tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Sistem politik merupakan “sistem interaksi” yang terdapat dalam semua masyarakat yang bebas atau merdeka. Dengan sistem interaksi ini dimaksudkan bahwa dalam sistem politik, baik yang bersifat tradisional maupun modern, terjadi hubungan timbal balik diantara aktor-aktor politik. Aktor-aktor politik yang mengadakan interaksi itu adalah individu-individu, ataupun lembaga atau organisasi daripada individu-individu tersebut. Dengan demikian sistem interaksi yang terjadi di dalam suatu sistem politik ditandai oleh hubungan timbal balik antara individu, ataupun antara kelompok dengan kelompok lainnya. Interaksi itu juga bisa dalam bentuk hubungan antara organisasi dengan organisasi lainnya dalam suatu sistem politik.
2. Sistem politik juga melaksanakan fungsi integrasi, bahwa tujuan pokok sistem politik mengusahakan tercapainya kesatuan di dalam masyarakat.
3. Fungsi adaptasi yaitu fungsi penyesuaian diri daripada sistem politik terhadap lingkungan masyarakatnya sendiri maupun lingkungan masyarakat lainnya.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam proposal penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu bertujuan untuk menjelaskan kebijakan pemerintah Swedia dalam melegalkan *Same Sex Marriage*. Jenis data yang dipakai yaitu jenis data sekunder

yaitu data yang berasal dari yaitu berasal dari buku, artikel dan akses media elektronik. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah studi literatur yaitu mencari dan membaca buku-buku, laporan jurnal, artikel, dan data-data internet baik nasional maupun internasional. Sedangkan teknik analisa data dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif dimana penulis menganalisis data sekunder yang kemudian dengan menggunakan teori dan konsep yang dapat digunakan untuk menjelaskann suatu fenomena atau kejadian yang sedang di teliti oleh penulis yaitu kebijakan *same sex marriage* di Swedia.

Hasil Penelitian

Fenomena LGBT dan Kebijakan Pemerintah Swedia

Latar belakang perjuangan kaum LGBT mempromosikan orientasi seksual dan identitas gender tak lepas dari sejarah panjang penegakkan hak-hak sipil. Penegakkan hak sipil ini dilatarbelakangi oleh adanya diskriminasi akibat pengagungan ras manusia berkulit putih dan merendahkan ras lain, diskriminasi terhadap wanita, dan bahkan penindasan satu ras atas ras yang lain. Hal tersebut telah membuat kaum-kaum yang termarginalkan dan tertindas menuntut hak-haknya. Mereka menuntut kesetaraan hak sebagai manusia. Hak tersebut antara lain adalah hak hidup, hak ekonomi, hak politik, dan lain-lain. Pada gilirannya perjuangan ini berkembang pada berbagai aspek termasuk di antaranya kebebasan dalam menentukan orientasi seksual dan identitas gender yang dianggap merupakan kategori hak yang harus dilindungi.

LGBT di Swedia memiliki hak untuk mendaftarkan kemitraan mereka. Kemitraan ini memberi berbagai perlindungan, tanggung jawab dan manfaat sebagai pernikahan, termasuk adopsi dan pengaturan untuk rincian hubungan hanya tersedia untuk pasangan sesama jenis. Meskipun RUU Swedia mengizinkan homoseksual untuk mengadopsi anak hingga dapat mengambil dari luar negeri, 17 negara yang disurvei oleh kemenlu Swedia mengatakan bahwa mereka menolak pasangan gay sebagai orang tua asuh. Pemerintah Swedia mengusulkan agar kaum lesbian dapat menerima inseminasi buatan. (Dalam: “ *Swedia legalisasy adopsi gay*” diakses di <http://newsbc.co.uk/2/hi> pada kamis, 6 juni 2002)

Beberapa kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah untuk kaum LGBT, diantaranya :

1. Pada tahun 1944 , melegalkan adanya aktivitas seksual / sesama jenis dengan minimal usia 18th. Beberapa tahun sebelum PBB mendeklarasikan piagam yang berisi tentang hak asasi manusia secara universal dan mendirikan *Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (RFSL)* ditahun 1950.
2. Pada tahun 1955, pasangan sesama jenis dapat mendaftarkan hubungan mereka dalam “kemitraan” (belum menikah). Swedia telah mengakui hubungan sesama jenis dengan mengizinkan pasangan sesama jenis ini berkomitmen untuk masuk ke dalam serikat sipil. Hal ini memberikan mereka status hukum yang sama sebagai pasangan menikah. Kemitraan yang terdaftar memberikan perlindungan, tanggung jawab dan manfaat penuh seperti pernikahan, termasuk adopsi dan pengaturan untuk [rincian](#) hubungan hanya tersedia untuk [pasangan sesama jenis](#) .
3. Pada tahun 1972, Swedia menjadi negara pertama di dunia yang melegalkan perubahan jenis kelamin.

4. Pada tahun 1979, Dewan kesetaraan dan kesejahteraan Nasional memutuskan homoseksualitas bukan lagi gangguan mental.
5. Pada tahun 1987, pelarangan diskriminasi terhadap orientasi seksual dan gender. Kaum LGBT
6. Pada tahun 1994, diskriminasi atas kaum LGBT ilegal.
Dengan adanya aturan ini, maka masyarakat sekitar yang masih mendiskriminasi kaum LGBT akan di kenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Pada tahun 1995, undang-undang kemitraan terdaftar dalam negeri telah berlaku. Dengan mengizinkan pasangan sesama jenis berkomitmen untuk masuk ke dalam serikat sipil. Parlemen Swedia mengesahkan *Register Partnership Act* di tahun 1995. Undang-Undang diadopsi secara eksplisit yang berisi pasangan sesama jenis dapat melegalkan hubungan mereka. LGBT di Swedia memiliki hak untuk mendaftarkan kemitraan mereka. Kemitraan ini memberi berbagai perlindungan, tanggung jawab dan manfaat sebagai pernikahan. , dan pengaturan untuk rincian hubungan hanya tersedia untuk pasangan sesama jenis. Kemudian register partnership hanya dapat dilakukan melalui otoritas hukum negara.
7. Pada tahun 1998, homoseksual dilegalkan.
8. Pada tahun 2002, kaum LGBT bisa mengadopsi anak.
Bisa mengadopsi anak dari dalam negeri, maupun luar negeri Swedia.
Mitra terdaftar sesama jenis bisa mengadopsi secara bersama. Pembuatan inseminasi untuk pasangan [lesbian di perbolehkan](#) pada tahun 2005. Orang-orang non-Swedia yang tinggal di Swedia. (Dalam, “ *Swedia legalisasy adopsi gay*”, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/> diakses pada kamis, 6 Juni 2002)
9. Pada tahun 2003, perubahan konstitusional untuk melarang ucapan kebencian berdasarkan orientasi sosial.
10. Pada tahun 2005, hak inseminasi untuk pasangan lesbian.
11. Pada tahun 2007, Sejak bulan Januari ,gereja utama di Swedia yaitu Gereja Lutheran Swedia, telah memberkati pernikahan sesama jenis di dalam serikat sipil.
12. Pada tahun 2008, Pemerintah Swedia telah merencanakan untuk memperkenalkan "netral gender" terlebih dahulu baru kemudian tindakan perkawinan yang akan memberikan kesetaraan pernikahan.
13. Pada tahun 2009, pernikahan sesama jenis dilegalkan. Pada bulan Januari adalah hari dimana undang-undang tentang pernikahan ini telah disahkan oleh parlemen Swedia. Secara hukum, pernikahan pasangan homoseksual sama dengan pasangan pernikahan heteroseksual termasuk hak dalam mengadopsi anak. Di tahun 2009 Parlemen Swedia mengubah kebijakan *register patnership Act* menjadi *same sex marriage*.
14. Pada tahun 2011, larangan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual ditambahkan pada konstitusi Swedia.
15. Pada tahun 2013, sterilisasi wajib ditegakkan dari undang-undang tentang perubahan gender.

Kebijakan Same Sex Marriage di Swedia

Swedia menjadi negara Eropa kelima, setelah Belanda, Belgia, Spanyol dan Norwegia, yang mengenali pernikahan sejenis ini. Swedia menjadi negara pertama di dunia yang menghapus homoseksualitas sebagai penyakit. Keputusan itu berarti bahwa gender tidak lagi memiliki dampak pada kemampuan untuk menikah dan

bahwa hukum pada kemitraan yang terdaftar telah dicabut. *Same sex marriage* telah disahkan menjadi undang-undang di Swedia. Swedia menjadi negara pertama yang melegalkan perkawinan sejenis di berbagai gereja besar di Swedia.

Sejak 2009 Swedia memiliki undang-undang nikah yang netral gender, yang berarti pasangan sesama jenis bisa menikah dengan kondisi yang sama dengan pasangan beda jenis. Sebelum dilakukannya pernikahan, para pihak harus mengajukan permohonan terhadap penyidikan *Swedish Tax Agency (Skatteverket)* dimana pernikahan sedang berlangsung. *Swedish Tax Agency (Skatteverket)* ialah kantor yang mengenai masalah pernikahan sesama jenis di Swedia, dimana pasangan sebelum menikah harus memenuhi prosedur yang telah ditetapkan, hingga bisa dipastikan bahwa pasangan yang telah mendaftarkan diri dipastikan telah memiliki dokumen yang benar. Ini adalah persyaratan untuk semua perkawinan yang dilakukan di Swedia dan akan berlaku untuk orang-orang yang bukan orang Swedia warga atau warga. *Swedish Tax Agency (Skatteverket)* akan mengkonfirmasi bahwa tidak ada hambatan untuk menikah. Konfirmasi harus dilakukan dalam waktu 4 bulan sebelum upacara pernikahan yang direncanakan (dan petugas harus mengkonfirmasi fakta tersebut dan bahwa tidak hambatan telah muncul sejak saat itu).

Ada beberapa persyaratan dan prosedur untuk dapat menikah sesama jenis di Swedia, berikut adalah syarat-syarat nya :

- a. Tidak harus tinggal (memiliki tempat tinggal) di Swedia atau memiliki kewarganegaraan Swedia untuk menikah di Swedia. Jika keduanya tidak memiliki kewarganegaraan Swedia atau tempat tinggal di Swedia, mereka memerlukan tempat tinggal (atau seseorang memiliki kewarganegaraan dan yang lainnya memiliki tempat tinggal) di negara di mana kemitraan seks atau pernikahan yang sama legal.
- b. Sebelum pasangan akan menikah, *Swedish Tax Agency (Skatteverket)* harus melakukan penyelidikan terhadap pasangan tersebut mengenai hambatan-hambatan pernikahan (*hindersprövning*). Pasangan tersebut harus mengajukan permintaan tertulis kepada *Swedish Tax Agency*.
- c. Seseorang dibawah usia 18 tahun dilarang menikah.
- d. Seseorang yang sudah menikah atau pasangan dalam kemitraan terdaftar (selain Konversi dari kemitraan yang terdaftar menjadi perkawinan atau perkawinan baru dari dua orang-orang yang saat ini dalam kemitraan terdaftar) mungkin tidak menikahi orang lain.

Para pihak harus menyerahkan jaminan tertulis bahwa mereka tidak terkait dan menyatakan di bawah sumpah apakah mereka sebelumnya telah menikah atau telah mendaftarkan diri sebagai pasangan. Jika sebelumnya pernah menikah atau terdaftar dalam kemitraan, partai harus membuktikan pembubaran pernikahan atau kemitraan. Jika bukan warga negara atau penduduk Swedia, dia harus mengunjungi pajak secara pribadi dan paspor yang berlaku atau kartu identitasnya menunjukkan kewarganegaraan.

Mengakomodir tuntutan/dukungan kelompok LGBT sesuai dengansistem politik

Pemerintah Swedia dapat melegalkan kebijakan *same sex marriage* karena dipengaruhi dari beberapa tuntutan serta dukungan dari kelompok pendukung kaum LGBT untuk membuat kebijakan *same sex marriage*. Hal ini dipengaruhi oleh

beberapa faktor, yaitu tuntutan dari dalam negeri, dimana para pendukung kaum LGBT menuntut agar pemerintah memberikan kaum LGBT hak untuk menikah seperti kaum heteroseksual lainnya. Selain mendapatkan tuntutan dari dalam negeri, kaum LGBT juga mendapatkan dukungan dari luar negeri, dukungan tersebut di dapat dari PBB. Kebijakan *same sex marriage* ini dibuat oleh pemerintah Swedia sesuai dengan sistem politik yang ada. Berikut penjabaran beberapa faktor mengenai pembuatan kebijakan *same sex marriage* di Swedia.

1. Tuntutan Dalam Negeri

Kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh suatu negara untuk melegalkan pernikahan sesama jenis juga mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar maupun. Swedia melegalkan pernikahan sesama jenis di tahun 2009 dan menjamin semua hak-hak para pelakunya. Kebijakan ini terlaksana karena adanya dukungan-dukungan yang mempengaruhi kebijakan pemerintah Swedia. Hubungan Antara sistem politik dengan lingkungannya sangatlah erat. Berbagai macam pengaruh yang berasal dari lingkungan mengalir masuk kedalam sistem politik, dan sebaliknya, sistem politik mempengaruhi lingkungannya. Pengaruh lingkungan yang masuk kedalam sistem politik berupa input-baik yang bersifat tuntutan maupun dukungan, sedangkan hasilnya berupa output (keputusan atau kebijakan) berpengaruh pada lingkungan masyarakatnya.

Pembukaan pernikahan sesama jenis diikuti oleh beberapa negara yang mana Belanda adalah negara pertama di tahun 2001, diikuti Belgia di tahun 2003, Spanyol di tahun 2005, Norwegia 2009, dan Swedia di tahun 2009. Perkembangan *same sex marriage* ini terus berkembang dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh adanya efek domino dari negara yang sebelumnya telah melegalkan *same sex marriage*. Dukungan dari luar negeri atau efek dari negara sebelum Swedia memang sangat mempengaruhi adanya kebijakan *same sex marriage* ini. Tidak hanya berhenti di Swedia, hingga saat ini terdapat 22 negara yang sudah melegalkan pernikahan sesama jenis. Hal ini sudah termasuk isu-isu global, dimana setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda.

Mengenai tuntutan yang di terima oleh pemerintah Swedia yang berasal dari dalam negeri ialah partai-partai politik pendukung kaum LGBT, kemudian organisasi yang didirikan guna menjamin keberadaan kaum LGBT yaitu RFSL. Tuntutan yang diberikan untuk kaum LGBT ialah agar kaum LGBT selain mendapatkan hak-hak untuk melindungi dari diskriminasi namun juga mendapatkan hak yang sama dengan kaum heteroseksual yaitu disahkan dalam hukum pernikahan. Saat pemerintah meminta izin kepada imam pada setiap gereja besar Swedia, ada beberapa imam yang menolak untuk menikahi pasangan homoseksual. Lalu RFSL mengecam para imam yang menolak untuk menikahi pasangan homoseksual.

2. Dukungan dari Luar Negeri

Selain mendapat tuntutan dalam negeri, Pemerintah swedia juga mendapatkan tuntutan dari luar negeri. Swedia mendapat dukungan dari PBB dapat di lihat pada saat Dewan HAM PBB mensahkan resolusi persamaan hak yang menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan sederajat dan setiap orang berhak untuk memperoleh hak dan kebebasannya tanpa diskriminasi apapun. Melalui

resolusi PBB, LGBT dipandang sebagai salah satu HAM yang patut dilindungi. Kelompok ini tidak lagi dianggap melakukan penyimpangan perilaku dan karenanya tidak layak mendapat stigmatisasi dan diskriminasi. Bahkan sebelumnya, WHO secara resmi telah mengeluarkan homoseksual dari jenis penyakit. Berbagai perlakuan yang dianggap diskriminasi dan melanggar hak-hak LGBT selama ini seperti pengunjungan, pelabelan, pemutusan hubungan kerja, pembatasan akses dalam fasilitas kesehatan, dan lain-lain, dianggap melanggar HAM.

Resolusi ini adalah resolusi PBB yang pertama yang secara spesifik mengangkat isu pelanggaran HAM berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Dengan adanya resolusi ini, pelanggaran HAM atas dasar orientasi seksual akan dianggap sebagai pelanggaran HAM tingkat tinggi. Resolusi ini merupakan sebuah dukungan dan pengakuan tingkat internasional kepada kelompok LGBT. Selain itu, Swedia memiliki kantor [ombudsman Swedia](#) yang melawan [diskriminasi](#) atas dasar [orientasi seksual](#). Pada tanggal 1 Januari 2009, ia bergabung dengan petugas ombudsman lainnya ke [Ombudsman Diskriminasi yang baru](#). HomO adalah ombudsman Swedia yang dilatih, dalam arti pejabat pemerintah yang menangani keluhan warga perorangan. HomO memiliki status sebagai [agen pemerintah](#). (Resolusi ini disampaikan oleh Republik Afrika Selatan, Brazil dan 39 negara lain dari benua Eropa dan Amerika. Dimana 23 negara meyetujui resolusi ini, 19 negara menolak dan 3 negara abstain)

Dukungan untuk kaum LGBT di Swedia juga datang dari organisasi internasional yang bernama ILGA (*Internasional Lesbian and Gay Association*) didirikan di Coventry, Inggris pada tahun 1978 dengan tujuan memperjuangkan hak asasi kaum LGBT secara internasional. Di danai oleh beberapa negara (Swedia, Finlandia, Norwegia, Belanda) dan yayasan (termasuk Arcus, Hivos, OSF). ILGA memiliki anggaran 1 juta euro, 7 anggota staf di kantor pusat di Jenewa.³ Pertama dan terutama, ILGA-Eropa fokus pada memberdayakan dan melatih aktivis yang bekerja untuk memajukan hak-hak orang LGBT di Eropa. Gerakan yang kuat yang mampu beradaptasi dan merespon secara efektif terhadap perubahan lingkungan adalah kunci untuk membuat perubahan yang jadi kenyataan.

Standar hak asasi manusia Eropa dapat membantu mendorong perubahan di dalam negara, sama seperti yang lain juga membutuhkan organisasi domestik yang kuat untuk mendorong perubahan tingkat Eropa. Sederhananya, tanpa gerakan LGBT yang disegarkan, perubahan tidak akan terjadi. Fokus utama ILGA-Eropa adalah memberdayakan orang-orang LGBT di Eropa. Agar gerakan mencapai tujuannya secara efektif, para aktivis membutuhkan seperangkat keterampilan yang sangat luas, pengetahuan mendalam tentang berbagai isu dan dapat melibatkan jaringan sekutu yang luas. ILGA-Eropa menawarkan beragam kegiatan yang memperkuat anggota dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk secara efektif mewujudkan perubahan politik, hukum, kelembagaan dan sosial. Disesuaikan dengan kebutuhan gerakan tersebut, ILGA-Eropa menyediakan berbagai bentuk

pengembangan kapasitas, mulai dari layanan masyarakat hingga advokasi domestik dan internasional. (<http://www.ilga-europe.org/what-we-do/our-work-supporting-movement>) Adanya dukungan yang di berikan untuk kaum LGBT, membuat pemerintah Swedia memberikan hak-hak bagi kaum LGBT, sebagai perlindungan dari diskriminasi. Hal ini menjadikan Swedia sebagai negara yang paling progresif terhadap kaum LGBT, dan membuat Swedia dikenal sebagai negara yang paling menerima keberadaan kaum LGBT di lingkungan Internasional. Oleh karena itu, tearkadang Swedia masih menutupi adanya tindakan diskriminasi terhadap kaum LGBT, agar citranya di lingkungan internasional tidak menurun.

Swedia memiliki posisi terhormat di dunia untuk melindungi hak asasi manusia, dan telah menjadi advokat penting untuk meningkatkan situasi untukLGBT global. Selanjutnya Swedia memiliki medan yang kuat dari penelitian seksualitas serta instansi pemerintah dan masyarakat sipil yang kuat. Tidak seluruh negara dapat memberikan hak-hak bagi kaum LGBT seperti apa yang diberikan pemerintah Swedia.

3. Artikulasi dan Agregasi Kepentingan

Adanya agregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan yang dilakukan oleh aktor baik itu dalam kelompok kepentingan maupun sebagai kelompok penekan dapat mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijakan pemerintah dengan cara persuasif, propaganda atau cara lain yang dianggap lebih efektif. Cara atau prosedur yang ditempuh oleh kaum LGBT untuk dapat memenuhi kepentingan-kepentingannya adalah dengan cara mengartikulasikan atau mengemukakan kepentingan-kepentingan tersebut kepada pemerintah yang berwenang untuk membuat keputusan atau kebijakan. Kepentingan kaum LGBT tersebut diartikulasikan atau dikemukakan oleh aktor yang mendukung. Aktor tersebut dalam pembuatan kebijakan *same sex marriage* ini adalah partai-partai politik dan organisasi yang mendukung adanya kaum LGBT agar bisa merubah status kemitraan mereka menjadi sebuah pernikahan sipil yang sah.

Dalam pembuatan kebijakan *same sex marriage*, pemerintah mendapatkan tuntutan dari partai-partai politik serta organisasi yang mendukung kaum LGBT. Partai-partai politik pendukung terdiri dari Partai Moderat, Partai Pusat, Partai Rakyat Liberal, dan Partai Demokrat Sosial. Pada tahun 2004, Parlemen membentuk sebuah komite untuk menyelidiki kemungkinan membuka pernikahan dengan pasangan sesama jenis . Laporan tersebut dikeluarkan pada bulan Maret 2007, mendukung pemberlakuan undang-undang nikah netral gender dan menghapuskan undang-undang kemitraan yang terdaftar (kemitraan terdaftar akan otomatis diubah menjadi perkawinan. Pihak oposisi Swedia mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk memaksa sebuah undang-undang yang mengesahkan pernikahan homoseksual melalui parlemen, dalam sebuah langkah yang akan mengambil inisiatif dari pemerintah. Sebuah penyelidikan pemerintah mengusulkan agar negara mengizinkan pasangan sesama jenis untuk menikah, daripada menawarkan kemitraan sipil seperti sekarang.(Dalam; “ *oposisi bisa memaksa dalam pernikahan sesama jenis*” dikutip oleh The local pada 15 januari 2008)

Organisasi yang mempunyai kepentingan lainnya pada pembuatan kebijakan *same sex marriage* ini adalah adanya tujuan dari organisasi RFSL. RFSL adalah sebuah organisasi non-profit yang bekerja untuk hak-hak lesbian, gay, biseksual dan transgender. Tujuannya adalah bahwa hak yang sama, peluang dan kewajiban akan berlaku untuk orang lain dalam masyarakat. Aktivitas organisasi seksual sesama jenis ini dilegalkan dpada tahun 1950. ("*LGBT Rights in Sweden*", mengutip dari www.Research.omicsgroup.org/index.php/LGBT_rights_in_Sweden diakses pada tanggal 12 Januari 2015)

RFSL bekerja untuk meningkatkan kualitas hidup orang-orang LGBT melalui lobi politik, penyebaran informasi, dan penyelenggaraan kegiatan sosial dan dukungan. Secara internasional, RFSL bekerja dengan [Asosiasi Lesbian dan Gay Internasional \(ILGA\)](#) dan juga bekerja sama dengan organisasi LGBT lainnya di negara-negara tetangga. RFSL menyiapkan laporan bayangan yang menarik perhatian sejumlah isu hak asasi manusia yang luas serta masalah LGBT di Swedia yang spesifik. RFSL berfokus pada kekerasan berbasis gender terhadap orang-orang LGBT, kesulitan dalam mengakses pekerjaan oleh orang-orang trans dan kekerasan dalam hubungan seks yang sama. Beberapa rekomendasi dari RFSL meliputi:

1. Memperkenalkan langkah-langkah, yang akan memudahkan akses ke pasar tenaga kerja.. Ini harus mencakup jalan hukum yang memastikan bahwa nama hukum dan data gender tentang sertifikat sekolah, ijazah dan dokumen terkait lainnya dapat diubah dan sesuai dengan ID seseorang.
2. Memastikan bahwa kekerasan terhadap orang lesbian, gay, biseksual, transgender termasuk dalam strategi yang memerangi kekerasan berbasis gender.
3. Menempatkan kebijakan yang jelas untuk mengambil alih kepemilikan isu kekerasan dalam hubungan sesama jenis dan LGBT dan mencakup pendekatan interseks terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
4. Menciptakan standar spesifik tentang bagaimana layanan sosial harus bekerja dalam rumah tangga dengan mempertimbangkan realitas spesifik hubungan sesama jenis dan LGBT.

Kepentingan-kepentingan atau tuntutan kaum LGBT telah diartikulasikan secara instrumental, maksudnya dapat mengambil bentuk suatu persetujuan dengan segala macam konsekuensinya. Kemudian proses selanjutnya ialah melalui agregasi kepentingan yang merupakan salah satu input. Setiap sistem politik mempunyai berbagai macam cara untuk mengagregasikan tuntutan yang telah diartikulasikan oleh kelompok kepentingan maupun organisasi lainnya. Pada pembuatan kebijakan *same sex marriage*, pemerintah kemudian meminta persetujuan terhadap Gereja besar Swedia. Melalui Hans Regner, mengatakan bahwa pasangan gay harus dapat menikah dan dianggap secara sah sebagai pasangan. Undang-undang saat ini yang mengizinkan kemitraan terdaftar untuk pasangan sesama jenis harus dicabut, dan dirubah menjadi sebuah pernikahan yang sah. Regner berpendapat bahwa argumen yang mendukung perubahan undang-undang tersebut melebihi argumen-argumen yang menentanginya. Menurutnya penghapusan diskriminasi harus segera dihapuskan, dan melegalkan

pernikahan sesama jenis ialah salah satu caranya. Regner juga meminta para Gereja mengizinkan pernikahan sesama jenis ini.

Gereja Per Samuelsson menulis dalam sebuah memorandum bahwa definisi pernikahan sebagai penyatuan pria dan wanita dimiliki oleh semua budaya besar dunia dan termasuk dalam "warisan budaya manusia." Dia menambahkan bahwa pernikahan adalah sakramen dalam tradisi Katolik. Perwakilan Gereja Swedia dan Gereja Perjanjian Misi Swedia mengatakan, bahwa tindakan pernikahan bukanlah sakramen dalam tradisi kaum LGBT, meskipun menambahkan bahwa mereka memiliki unsur-unsur tertentu yang menyerupai sakramen. Regner mengakui bahwa kurangnya kewajiban dari kelompok agama untuk menikahi pasangan gay bisa menimbulkan masalah, karena ia menginginkan istilah "pernikahan" hanya berlaku untuk serikat kaum heteroseksual. Sementara heteroseksual saat ini dapat menikah baik dalam upacara peradilan atau upacara gereja di Swedia, homoseksual hanya diperbolehkan mendaftarkan kemitraan mereka dalam sebuah upacara sipil. Jika undang-undang baru diadopsi, Swedia, yang sudah menjadi pelopor dalam memberi pasangan seks yang sama hak untuk mengadopsi anak-anak, akan menjadi negara pertama di dunia yang mengizinkan kaum gay untuk menikah di dalam sebuah Gereja besar.

Mengetahui struktur yang menjalankan fungsi agregasi kepentingan, yang pada umumnya setiap negara dijalankan oleh birokrasi dan partai politik, maka perlu pula membicarakan mengenai cara yang ditempuh oleh struktur-struktur dalam menjalankan fungsi agregasi kepentingan. Secara umum, ada 3 macam style agregasi kepentingan yang masing-masing mempunyai perbedaan satu dengan yang lain. Dalam pembuatan kebijakan *same sex marriage* ini, menggunakan style yang *paragmatic-bargaining*, yaitu dimana tuntutan kaum LGBT yang datang, dikombinasikan sehingga menjadi beberapa macam alternatif dalam kebijaksanaan. Didalam style agregasi semacam ini, usaha-usaha untuk mengadakan kompromi dan melihat situasi keadaan nampak dengan jelas mendominasi proses agregasi kepentingan. Bisa dilihat saat pemerintah meminta kepada Gereja besar Swedia agar mengizinkan pernikahan sesama jenis dapat dilaksanakan, seperti pernikahan pada umumnya.

4. Pembuatan Kebijakan

Salah satu fungsi output adalah pembuatan kebijakan, maka didalam mengadakan pembahasan mengenai fungsi pembuatan kebijakan harus melibatkan fungsi-fungsi output lainnya, maksudnya penerapan aturan yang ada. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kaum LGBT dengan berbagai macam cara yang ditempuh, dapat menyatakan atau mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya kepada pemerintah yang berwenang menetapkan kebijakan. Kepentingan-kepentingan atau tuntutan kaum LGBT tersebut setelah melalui prosedur atau tata cara yang berlaku pada sistem politik dan sampai kepada yang mempunyai wewenang untuk membuat peraturan. Pada umumnya badan atau lembaga yang mempunyai wewenang untuk membuat peraturan-peraturan adalah badan perwakilan rakyat dengan pemerintah sangat dibutuhkan

Hal ini dapat dilihat dari dukungan-dukungan yang diberikan partai politik serta organisasi yang mendukung kaum LGBT dalam pembuatan kebijakan *same sex marriage* yang ditujukan kepada pemerintah. Kemudian pemerintah bersama pendukung kaum LGBT bekerjasama dalam pembuatan kebijakan *same sex marriage*. Pemerintah kemudian membuat proses agar kebijakan ini bisa diterapkan dan ditetapkan sesuai peraturan undang-undang. Pasangan seks yang sama telah bisa menjadi mitra sipil di Swedia sejak 1995, dan perubahan undang-undang tersebut tidak secara otomatis menjadikan mereka suami dan istri atau istri dan suami, jika mereka ingin menikah, mereka harus mengadakan upacara baru, untuk mendapatkan kemitraan yang diubah menjadi sebuah pernikahan. Pemerintah terpecah dalam masalah ini dengan mitra koalisi Demokrat Kristen satu-satunya partai di parlemen Swedia yang menentang perpanjangan istilah "pernikahan" untuk memasukkan non-heteroseksual. Kelompok agama di Swedia terbagi dalam masalah ini. Beberapa pastor Gereja Lutheran dari Swedia mengatakan bahwa mereka akan menikahi pasangan sesama jenis, dan gereja akan mengambil sikap yang sama mengenai masalah ini. ("Swedia memperkenalkan pernikahan netral gender" Sumber dari Radio Swedia Internasional di 1 Mei 2009)

Di negara Swedia sendiri, setidaknya memiliki 6 dari 7 partai politik parlemen nasional yang mendukung reformasi tersebut. Partai tersebut adalah Partai Kiri, Partai Hijau, Partai Demokrat Sosial, Partai Rakyat Liberal, Partai Moderat (Konservatif Swedia) dan Partai Pusat. Partai Demokrat Kristen menentang gagasan itu, sedangkan konservatif moderat atau liberal di tandatangani oleh dukungan mereka di kongres partai mereka pada tahun 2007. Mayoritas Swedia menyetujui pernikahan sesama jenis, tetapi ada beberapa oposisi yang kuat dari organisasi-organisasi keagamaan. Pada tahap *agenda setting* parlemen Swedia membentuk sebuah komite untuk menyelidiki kemungkinan pembukaan pernikahan untuk pasangan sesama jenis. Hasilnya adalah pemberlakuan netral gender hukum pernikahan dan menghapuskan hukum kemitraan terdaftar. Kemudian pada tahap *policy formulation*, setidaknya ada 6 dari 7 partai politik parlemen nasional yang mendukung reformasi kebijakan tersebut.

Mayoritas Swedia menyetujui pernikahan sesama jenis, tetapi ada beberapa oposisi yang kuat dari organisasi-organisasi keagamaan. Pada tanggal 12 Desember 2007, *Gereja Swedia* memberi lampu hijau bagi pasangan sesama jenis untuk menikah di gereja, tetapi dianjurkan *pernikahan* dibatasi untuk pasangan lawan jenis. Pada tahap *policy adoption* Pada tanggal 21 Januari 2009, Parlemen Swedia membuat konsep hukum perkawinan netral gender. Dewan Gereja Swedia akhirnya menyetujui sakramen pemberkatan netral untuk para gender baru ini setelah diadakannya voting dengan hasil yang cukup jauh, 176-62. Uskup Agung Swedia, Anders Wejryd, mengatakan bahwa dukungan atas gerakan gereja tersebut adalah 'sebuah keputusan yang tepat'. *The Church of Sweden* adalah gereja Lutheran terbesar di Swedia. (Dalam artikel "Perbandingan kebijakan publik di Belanda dan Swedia (studi kasus : pelegalan *same sex marriage*) pada Jan 8th)

5. Penetapan Kebijakan

Setelah melalui proses pembuatan terhadap kebijakan *same sex* marriage, kemudian pemerintah telah menetapkan kebijakan tersebut melalui RUU yang telah disahkan pada tanggal 1 April 2009 dan mulai berlaku pada 1 Mei 2009 oleh kanselir kehakiman Hans Regner. Proses voting ini menghasilkan 261 suara yang mendukung, 22 suara yang menentang dan 16 abstain. Pada tahap *implementation*, tanggal 22 Oktober 2009, dewan pemerintahan dari Gereja Swedia melakukan vote, yang memilih 176 yang mendukung dan 62 yang menentang memungkinkan imam untuk menikahkan pasangan sesama jenis dalam netral gender pada upacara pernikahan di gereja, termasuk penggunaan istilah perkawinan.

Pemberlakuan pernikahan sesama jenis dilakukan oleh gereja Svenska Kyrkan sejak 1 September 2009. Swedia membuka pernikahan pasangan sesama jenis secara nasional, pada tanggal 20 Oktober 2009, dewan pengurus gereja Swedia memberi dukungan serta menjadi imam untuk menikahkan pernikahan sesama jenis dalam upacara netral gender. Pernikahan sesama jenis inilah yang pertama kali dilakukan oleh gereja dari 1 November 2009. Kemudian yang pada tahap *evaluation*, hak-hak kaum LGBT terjamin dalam pencapaian hak-haknya, kaum LGBT diperbolehkan untuk mengadopsi anak, inseminasi buatan, bahkan boleh masuk ke militer. Kaum gay pun tidak dilarang untuk masuk ke militer. *Swedish Army Forces* secara aktif juga menyuarakan bahwa kaum LGBT tidak perlu menyembunyikan orientasi seksual mereka. Hak-hak mereka ini terjamin seperti yang telah dicetukan oleh konstitusi Swedia, bahwa mereka telah melarang adanya diskriminasi bagi kaum ini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa hasil dari penelitian mengenai Kebijakan *same sex marriage* di Swedia dengan melihat pada peningkatan dari tahun 1944-2009 bisa disimpulkan bahwa pemerintah sangat menjamin keberadaan kaum LGBT di swedia. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang kebijakan pemerintah Swedia dapat melegalkan pernikahan sesama jenis yaitu adanya hak asasi manusia yang setara, adanya diskriminasi antara kaum homoseksual dengan kaum heteroseksual, dan adanya perbedaan domestik partnership dengan pernikahan. Karena adanya perbedaan-perbedaan inilah maka kaum LGBT mengajukan tuntutan kepada pemerintah melalui organisasi LGBT, yaitu RFSL, ILGA. Tetapi sebuah tuntutan tidak akan menjadi isu politik apabila tidak adanya dukungan dari individu/organisasi yang mempunyai pengaruh besar terhadap kebijakan pemerintah.

Dukungan yang diberikan baik dalam negeri Swedia itu sendiri maupun Internasional. Dukungan yang berasal dari dalam negeri yaitu dukungan dari partai-partai politik didalam parlemen Swedia, dukungan dari Gereja Lutheran, sebagian besar masyarakat Swedia beragama Lutheran, dan Gereja Lutheran mempunyai UU yang memperbolehkan pasangan Homoseksual melakukan pernikahan didalam gereja yang sama, seperti pasangan Heteroseksual. Kelompok kepentingan lain seperti SRHR, di level internasional komite hak asasi manusia PBB dan negara Belanda dan negara sebelum Swedia juga berkontribusi terhadap mempengaruhi kebijakan Pemerintah Swedia. Selain itu, negara Swedia termasuk salah satu negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis mayoritas di Gereja secara agama yang di anutnya.

Daftar Pustaka

Buku

Deana F. Morrow, *Sexual Orientation and Gender Expression in social Work Practice*, Columbia University Press New York,

Haryanto, (1982), *Sistem Politik : Suatu Pegantar*, Liberty, Yogyakarta

Humaniora, Seri, *Jalan Kemanusiaan panduan untuk memperkuat hak asasi manusia*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 1999.

Jens M. Scherpe, *the legal recognition of same-sex couples in Europe and the role of European Court of Human Rights*

Varma.S.P. (2003), *Teori Politik Modern*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Artikel

“Perbandingan kebijakan publik di Belanda dan Swedia (studi kasus : pelegalan *same sex marriage*) pada Jan 8th

“ *oposisi bisa memaksa dalam pernikahan sesama jenis*” dikutip oleh TheLocal pada 15 januari 2008

” *Swedia memperkenalkan pernikahan netral gender* ” Sumber dari Radio Swedia Internasional di 1 mei 2009

Internet

Say I do to same sex marriage mengutip dari <http://www.sweden.se/eng/Home/Lifestyle/Reading/Sweden-says-I-do-to-same-sex-marriage>

Pernikahan kemitraan yang terdaftar mengutip dari <http://www.rfsl.se/?p=420> diakses pada tanggal 05 Januari 2015

Sweden allows same-sex marriage mengutip dari news.bbc.co.uk/2/hi/7978495.stm di akses pada tanggal 2 april 2009.

<https://sweden.se/society/working-for-a-gay-and-equal-sweden>

Partai hijau meminta maaf atas HIV diakses oleh news thelocal.se pada 1 des 2012

marriage-in-sweden <https://www.rfsl.se/en/lgbtq-facts>

oposisi bisa memaksa dalam pernikahan sesama jenis” dikutip oleh TheLocal pada 15 januari 2008

“*LGBT Rights in Sweden*”, www.Research.omicsgroup.org/index.php/LGBT_rights_in_Sweden diakses pada tanggal 12 Januari 2015